



PEREMPUAN DAN GERAKAN SOSIAL POLITIK

Oleh

Agustina Damanik

Email: agustinadamanik@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

Seen from a long historical trajectory, although in quantity terms, the emergence of women's organizations in Indonesia as components of civil society is quite large. However, it is still not fully able to improve the position and condition of women. During the New Order era, the development of women's organizations in Indonesia grew rapidly. However, there is an impression that women's organizations in this era experience hegemony working only for the interests of the State, not yet becoming a social movement fighting for a social transformation in society.

Kata Kunci; Perempuan, gerakan, sosial, dan politik.

A. Pendahuluan

Dilihat dari lintasan sejarah yang panjang, walaupun secara kuantitas munculnya organisasi-organisasi perempuan di Indonesia sebagai component *civil society* yang cukup besar. Akan tetapi masih belum sepenuhnya mampu memperbaiki posisi dan kondisi kaum perempuan. Pada masa Orde Baru perkembangan organisasi perempuan di Indonesia begitu berkembang secara pesat. Akan tetapi, ada kesan bahwa organisasi perempuan pada era ini mengalami hegemoni bekerja hanya untuk kepentingan Negara saja, belum menjadi gerakan social yang memperjuangkan sebuah transformasi social dalam masyarakat.

Menurut konsep antropologi dan sosiologi gerakan social (social movement) diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk perilaku kolektif. Sejumlah ahli sosiologi, seperti yang ditulis oleh Sunarto telah merumuskan beberapa komponen penting yang terkait dengan sebuah gerakan social yaitu adanya tujuan atau kepentingan bersama, jangka panjang berupaya melakukan perubahan ataupun menentang perubahan itu sendiri.¹

Sedangkan menurut Turner dan Killian gerakan social secara formal diartikan sebagai suatu kolektivitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menentang terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat, atau dalam kelompok itu sendiri.



Adapun ketidakadilan tersebut berasal dari implikasi kebijakan pembangunan dan Negara. Pendapat tersebut diperkuat oleh Mosse bahwa ia melihat bahwa banyak perencanaan dan proses pembangunan yang kurang mempertimbangkan perspektif dan kepentingan kaum perempuan. Oleh sebab itulah, isu-isu perempuan serta permasalahannya muncul berkaitan erat dengan proses pembangunan dan kebijakan Negara khususnya di Negara dunia ketiga.

B. Bentuk Organisasi Social Politik Perempuan

Menurut Zulminarni isu gender dalam perkembangan masyarakat secara internasional muncul pada tahun 1970-an. Ketika para kritisi pembangunan mulai melihat dampak proses pembangunan terhadap kaum perempuan di Negara Dunia Ketiga.

Di Indonesia, isu mengenai perempuan baru dimasukkan perhitungan dalam konsep pembangunan mulai 1978, dengan lahirnya butir tentang peningkatan peranan wanita dalam GBHN. Mulai saat itu, banyak gerakan perempuan tumbuh secara perlahan. Ada tiga isu perempuan yang dikaitkan dengan proses pembangunan, yaitu: isu keadilan, isu kemiskinan, dan isu kesetaraan gender. Dalam rangka untuk melakukan perubahan dan respons terhadap situasi dunia yang sedang berlangsung, berbagai organisasi perempuan tumbuh dan berkembang.

Dengan banyaknya model organisasi perempuan yang ada terkadang sulit untuk dibedakan satu dengan lainnya. Salah satu organisasi perempuan dunia yang dibentuk tahun 1984 di Banglore, India Selatan, bernama DAWN (Development Alternatif eith Women for a New Era) mengidentifikasi setidaknya ada enam macam organisasi perempuan dunia. Mulai organisasi perempuan yang sangat tradisional sampai organisasi dengan analisis dan agenda feminisme khusus. Adapun lima oragnjsasi perempuan tersebut adalah: pertama, organisasi perempuan tradisional. Organisasi model seperti ini memiliki kecenderungan untuk berkuat disekitar peran gender tradisional. Organisasi ini mendapat dukungan dari perempuan kelas menengah dengan pendekatan patronase serta kesejahteraan, kedua, kelompok yang berafiliasi dengan partai politik atau menjadi anggota dari partai politik tertentu, Ketiga, organisasi yang berbasis pada pekerja, masuk didalamnya serikat buruh sector formal dan organisasi wiraswasta perempuan, Keempat, organisasi yang muncul dari pendanaan proyek, koperasi kredit, proyek peningkatan pendapatan dan inisiatif lain bagi perempuan miskin. Tipe organisasi tersebut berkembang pesat melalui program besar didukung oleh PBB. Kelima, organisasi kelompok akar rumput dan organisasi peneliti serta sumber daya.



Meskipun demikian, DAWN juga menemukan masih banyak lagi organisasi perempuan yang sulit untuk diidentifikasi pada satu bagian tertentu, seperti organisasi keagamaan dan kultural perempuan.²

Tidak jauh beda dengan temuan DAWN tersebut, Truong menemukan tujuh jenis organisasi perempuan dan aktivitasnya di dunia ketiga. Ketujuh organisasi perempuan tersebut yaitu: pertama, organisasi tradisional, organisasi ini berorientasi pada pelayanan dengan fokus utamanya meningkatkan kesejahteraan sosial. Organisasi ini biasanya beranggotakan kaum perempuan kelas menengah dan tidak mempunyai perspektif tentang subordinasi atas perempuan. Kedua, perempuan dari partai politik, terkait dengan program politik partai untuk menarik kaum perempuan agar memperoleh suara sebanyak-banyaknya di parlemen, dan memiliki tujuan untuk memperjuangkan diterapkannya perspektif feminis dalam program partai, Ketiga. Organisasi buruh, fokus utamanya memperjuangkan penghapusan diskriminasi upah, posisi, dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan buruh perempuan seperti cuti haid dan cuti hamil, keempat, proyek-proyek perempuan dalam pembangunan. Terwujud dalam organisasi-organisasi kecil yang menghasilkan kerajinan tangan atau menyediakan kredit. Proyek ini bisa dari pemerintah maupun non pemerintah, kelima, organisasi masyarakat lapisan bawah (*grass roots organization*). Umumnya organisasi seperti ini memiliki tujuan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, pemberantasan buta huruf, lingkungan, melawan kekerasan, memiliki komponen protes dan kegiatan peyadaran yang besar. Organisasi tersebut biasanya mengkhususkan pada satu isu yang aktual dan nyata dengan dampak politik yang cukup besar. Namun, organisasi ini sering tidak tahan lama sebatas tercapainya cita-cita. Keenam. Organisasi penelitian perempuan, umumnya didirikan oleh ilmuwan kelas menengah dengan menjalankan sejumlah program penelitian yang inovatif serta memperoleh perspektif feminis dalam penelitian, ketujuh, organisasi perempuan profesi. Berkaitan dengan suatu profesi dan organisasi lainnya yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan profesi mereka.

Gerakan sosial merupakan tulang punggung dalam proses demokratisasi Indonesia.³ Sebab melalui gerakan sosial kritik terhadap kehidupan bernegara diproduksi dan tuntutan atas perubahan dilahirkan. Gerakan sosial sebelum reformasi hingga saat ini tidak dapat dipisahkan dari peran penting gerakan perempuan. Namun hari-hari ini gerakan sosial—gerakan perempuan mendapat sejumlah tantangan baik dari dalam dan luar dirinya sendiri. Hal ini perlu mendapat perhatian, sebab melemahnya gerakan sosial mengancam keberlangsungan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.



Mempersoalkan tentang tantangan otoritarianisme terhadap gerakan perempuan. Menurut Ruth gerakan perempuan adalah momentum terjadinya konsolidasi berbagai organisasi perempuan untuk mendorong agenda politik bersama. Setidaknya ada dua hal yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan yaitu agenda politik perempuan dan agenda politik yang bersifat umum sebagai warga negara.⁴

Menurut Ruth gerakan perempuan di Indonesia tidak sekadar bicara soal kekerasan terhadap perempuan tapi juga kritik terhadap otoritarianisme. Baginya agenda politik melawan kekerasan terhadap perempuan telah berhasil menjadi simpul yang mengonsolidasi gerakan perempuan sebelum reformasi. Setelah reformasi konsolidasi beralih pada isu peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Ruth juga menjelaskan bahwa setelah tahun 2004 gerakan perempuan mengalami divergensi. Pada periode ini tumbuh serikat-serikat berbasis sektoral di lokal. Dalam paparannya, Ruth menyadari sejumlah capaian gerakan perempuan pascareformasi.

Menurut Ruth munculnya kekuatan anti feminis kerap kali ditujukan sebagai usaha melemahkan dan menjinakkan perempuan. Modus ini perlu dikritisi sebab pelemahan gerakan perempuan adalah pelemahan terhadap demokrasi. Bagi Ruth penjinakan perempuan adalah modus politik otoritarian dan atau politik fasis. Sebab bila gerakan perempuan dilemahkan maka mereka akan mudah dimobilisasi ke berbagai kepentingan massa yang seringkali jauh dari agenda perempuan.

Menurut Iswanti bahwa keprihatinannya pada tantangan gerakan perempuan di Indonesia dalam kaitannya dengan lembaga donor. Bagi Iswanti, LSM memiliki peran penting dalam demokratisasi Indonesia. Sementara saat ini keberlangsungan LSM di Indonesia sedang rentan terkait relasinya dengan lembaga donor. Iswanti menyatakan bahwa banyak lembaga donor memberikan dukungan pada organisasi masyarakat sipil, artinya lembaga donor berkontribusi pada tumbuh dan berkembangnya organisasi masyarakat sipil dan menyumbang pada sejumlah kemajuan pada isu perempuan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh LSM dalam kerjasamanya dengan donor. Sebab menurut Iswanti agenda lembaga donor sedikit-banyak memengaruhi gerak LSM. “Lembaga donor memiliki peran dan pengaruh bagi LSM, hampir tidak ada LSM yang tidak terkait dengan lembaga donor. Meskipun LSM-LSM kita bukan didirikan oleh para lembaga donor tetapi bagaimana agenda mereka memengaruhi bagaimana metode dan kegiatan LSM,” tutur Iswanti.



Iswanti menyadari bahwa lembaga donor telah berkontribusi pada gerakan perempuan, namun ia melihat pula bahwa mekanisme kerjasama LSM dan donor telah menghilangkan semangat gerakan sosial yang berlandaskan nilai-nilai gotong-royong, kerelawanan dan lain sebagainya. Sungguh sangat disayangkan bahwa pelembagaan gerakan sosial telah menghasilkan kondisi ketergantungan, tidak mampu mengkritik lembaga donor dan gagal dalam pendidikan kritis masyarakat. Iswanti menyarankan tentang pentingnya memikirkan alternatif pendanaan, karena jika tidak Indonesia mengalami sebuah krisis demokrasi. Kondisi dimana negara beroperasi tanpa kritik dari masyarakat yang selama ini kebanyakan dilakukan oleh LSM.

C. Gerakjan Organisasi Perempuan Di Indonesia

Sebagai salah satu Negara dunia ketiga Indonesia juga terdapat berbagai organisasi perempuan dengan corak yang khas, Harsono menemukan ada beberapa front perjuangan peningkatan status dan martabat kaum perempuan di Indonesia dalam bidang social secara umum dan politik, yang dibaginya dalam tiga kubu organisasi perempuan yaitu;

Pertama, organisasi pemerintah, seperti *Darmawanita*, *PKK*, *Dharma Pertiwi*, dan lain-lain, organisasi seperti *Dharma Wanita*, *PKK* dan *Dharma Pertiwi* merupakan organisasi kaum perempuan yang dianggap resmi oleh pemerintah dan mendapat kebebasan penuh dalam menyusun upaya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan politik dalam pengertian luas.

Kedua, organisasi non pemerintah (*ornop*) yang terdiri dari *Kowani* (divisi perempuan dari organisasi masyarakat dan agama). Adapun organisasi semisal *Kowani* (*Kongres Wanita Indonesia*) merupakan organisasi untuk menggalang partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan di luar atau bukan bentukan pemerintah, tetapi mereka relative mendapat kebebasan dalam aktivitas di tengah-tengah masyarakat.⁵

Ketiga, lembaga *Swadaya Masyarakat* atau *LSM* perempuan di seluruh Indonesia. Sedangkan *LSM-LSM* perempuan termasuk kategori *Ornop* seperti *Kowani*. Bedanya mereka kurang mendapat kebebasan dalam beraktivitas dibandingkan *Kowani*. Ketiga front organisasi tersebut berbeda-beda dalam memandang isu-isu perempuan terkait dengan pembangunan.

Dua kubu pertama (organisasi seperti *Darmawanita*, *PKK*, *Dharma Pertiwi*, dan organisasi non pemerintah semisal *Kowani*) penekanannya lebih pada bagaimana menjadi seorang perempuan yang ideal sekaligus pendukung karir suami. Peran dan permasalahannya



politik kaum perempuan dalam organisasi ini kurang menjadi perhatian. Arah pengembangan perempuan di atas di tujukan dalam rangka berpartisipasi untuk menyukseskan proses pembangunan. Bukan pembangunan yang diarahkan sesuai dengan kepentingan kaum perempuan.

Bagi kubu pertama di atas, persoalan keterbelakangan perempuan termasuk di bidang politik dipandang dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki. Karena itu isu peningkatan peran kaum perempuan dalam bidang politik harus dimulai dengan peningkatan kualitas pendidikan mereka. Sedangkan bagi kubu kedua (LSM_LSM Perempuan), organisasi ini berangkat dari isu-isu dan persoalan yang dihadapi kaum perempuan dalam proses-proses pembangunan. Dengan tujuan, agar kaum perempuan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) terhadap kondisi dan dampak dari pembangunan.

Karena itu keterlibatan kaum perempuan dalam bidang politik harus ditingkatkan. Agar kebijakan pembangunan yang dihasilkan lebih peka dan sensitive gender. Salah satu upayanya adalah dengan cara memberikan kuota dan membuka peluang yang sama bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam bidang politik. Meskipun demikian, Mar'iyah menjelaskan bahwa organisasi gerakan perempuan di Indonesia sangat heterogen, dan sekali lagi tergantung pada isu social dan politik yang dikembangkannya. Persoalan penting selanjutnya adalah, tidak semua kelompok atau organisasi yang bergerak di bidang persoalan perempuan bergerak sebagai sebuah gerakan perempuan.

Dengan kata lain, banyak organisasi perempuan tidak secara langsung menjadi organisasi gerakan perempuan. Terutama jika penggunaan wacana peran perempuan dalam keluarga masih menjadi titik tekan dari kelompok atau organisasi perempuan tersebut. Sesungguhnya, sebuah gerakan perempuan lebih menekankan pada eksistensi mereka dalam suatu gerakan social dan politik untuk mencapai tujuan bersama, baik mereka yang menyatakan dirinya feminis atau bukan.⁶

Kenyataannya, walaupun organisasi social kemasyarakatan termasuk organisasi perempuan, secara kuantitas cukup banyak dan heterogen namun sebagian besar organisasi social kemasyarakatan tersebut di Indonesia. Termasuk organisasi perempuan, belum berperan secara maksimal dalam melakukan penguatan dan pemberdayaan kaum perempuan dalam bidang politik. Bidang politik ternyata merupakan bidang social yang paling sulit untuk dimasuki oleh kaum perempuan. Meskipun belakangan ini peserta kaum perempuan dalam bidang politik semakin meningkat. Tetapi hal ini bagi kebanyakan aktifis perempuan



yang kritis di Indonesia belum merupakan representative dan belum mewakili kepentingan kaum perempuan Indonesia.

Hal ini dikarenakan oleh sejumlah persoalan yang dihadapi oleh organisasi social kemasyarakatan di antaranya, 1) problem berkaitan dengan inovasi yang belum merupakan keinginan seluruh anggotanya, 2), rendahnya rasa memiliki dari anggota (konsekuensi dari problem pertama), 3), pengelolaan organisasi yang cenderung elitis oleh pihak pengurus, 4), persoalan dana melakukan kegiatan serta 5), belum adanya konsep dan implementasi gagasan pembentukan jaringan antar organisasi social kemasyarakatan yang ada. Selain itu, proses peningkatan keikutsertaan perempuan dalam program-program pengembangan masyarakat sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh berbagai hal, baik yang bersifat structural maupun kultural di mana sering kali dianggap masih belum berpihak pada kepentingan perempuan.

Pemikiran di atas dibenarkan oleh Fakhri, ia menyatakan, bahwa jika melihat persoalan ketidakadilan terhadap kaum perempuan terkait erat dengan persoalan system dan struktur ketidakadilan dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu harus dilakukan analisis mendalam terhadap system dan struktur social yang ada tersebut. Itu berarti dalam konteks tulisan ini bahwa gerakan membangun kesadaran dan politik organisasi perempuan yang ada harus dimulai dengan mendorong sebuah perubahan dalam system kemasyarakatan kita. Memperjuangkan perbaikan posisi dan kondisi kaum perempuan tidak terlepas dari persoalan system dan struktur yang ada. Didalam hal inilah gerakan social dan politik organisasi perempuan dimaknai sebagai gerakan transformasi perempuan. Sebuah proses gerakan untuk menciptakan perubahan hubungan antar sesama manusia (perempuan dan laki-laki) yang secara fundamental baru, lebih baik dan lebih adil dalam semua bidang kehidupan.

Banyaknya gerakan social politik kaum perempuan masa sekarang ini, di satu sisi mengisyaratkan sebuah proses demokratisasi dan sedang bergeraknya wacana civil society di Indonesia. Segala ekspresi masyarakat muncul. Termasuk dalam memperjuangkan nasib kaum perempuan. Hal ini terlihat dari munculnya banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan, organisasi perempuan, pusat studi perempuan, dan sebagainya. Di sisi lain, dinamika tersebut menunjukkan masih memperhatinkannya dunia perempuan kita. Betapa tidak, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan masih akrab dengan keseharian masyarakat. Seperti yang dijelaskan Hersono bahwa munculnya isu-isu diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, merupakan gambaran masih buruknya kondisi kaum perempuan di Indonesia kini.



Oleh sebab itu transisi demokrasi harus mampu membuka ruang yang sehat bagi munculnya komponen-komponen civil society yang kuat dan relative sedikit ketergantungan pada Negara dalam mewujudkan kepentingannya. Seperti yang ungkapkan Linz dan Stephan seperti dikutip oleh Mar'yah memberikan lima indikasi eksisnya sebuah pemerintah yang demokratis pertama, adanya kondisi penguatan pembangunan civil society, kedua, adanya masyarakat politik (political society) yang otonom, ketiga, adanya aturan hukum yang dapat mengatur kebebasan warga Negara untuk menjalankan organisasi atau membentuk asosiasi, keempat, birokrasi Negara yang demokratis . kelima, perlu adanya institusionalisasi masyarakat bisnis, (economis society)

Walaupun secara kuantitas perkembangan organisasi perempuan di Indonesia terus meningkat,⁷ tetapi secara kualitas gerakan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Organisasi gerakan perempuan di Indonesia sangat heterogen tergantung pada isu social dan isu politik yang dikembangkannya karena itu bisa dikatakan bahwa tidak semua kelompok atau organisasi yang bergerak di bidang persoalan perempuan bergerak sebagai sebuah gerakan perempuan. Banyak organisasi perempuan tidak secara langsung menjadi organisasi gerakan perempuan. Terutama jika pengguna wacana peran perempuan dalam keluarga masih menjadi titik tekan dari kelompok atau organisasi perempuan tersebut. Sebuah gerakan social dan politik kaum perempuan lebih menekankan pada eksistensi mereka dalam suatu gerakan demi mencapai tujuan bersama. Baik mereka yang menyatakan dirinya feminis atau bukan.

Transisi demokrasi yang sedang berlangsung kini harus mampu membuka ruang sehat serta mendorong partisipasi peran social dan politik yang setara dan adil bagi setiap warga mnegara, baik laki-laki maupun perempuan dalam semua bidang. Kaharusan ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah pilihan demokrasi, yang komponen esensinya adalah kompetisi sehat, partisipasi penuh dan kebebasan politik. System demokrasi secara teoritis tidak mengenal adanya diskriminasi, marjinalisasi, dan subordinasi dlama bidang social dan politik. Tidak ada istilah warga kelas satu dan kelas dua dalama system demokrasi.

D. Gender dan Ideologi Feminisme

Feminisme sebagaimana dijelaskan Fakih merupakan kumpulan dari pemikiran, pendirian, dan aksi yang berangkat dan adannya kesadaran, asumsi, serta kepedulian terhadap ketidakadilan, ketidaksetaraan penindasan, atau diskriminasi atas kaum perempuan.⁸



Feminism merupakan gerakan yang berusaha untuk menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi tersebut.

Pada awalnya, feminisme bukanlah merupakan teori perubahan social secara khusus. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, gerakan feminisme memproyeksikan suatu visi munculnya sebuah tatanan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera menurut persepektif feminisme. Dalam konteks inilah feminisme dikategorikan sebagai salah satu teori perubahan social alternative.

Arivia menjelaskan meskipun feminisme bukan merupakan barang baru di Indonesia, tetapi feminisme sebagai wacana pemikiran dan aksi politik mulai mendapat angin segar dalam dunia akademis dan aktivitas di tingkat akar rumput (grass roots) sekitar tahun 1980-an. Isu-isu perempuan, gender dan feminisme tersebut semakin marak dalam wacana social politik dan kemasyarakatan sejak proses reformasi berlangsung hingga saat ini.

Sebagaimana dijelaskan terdahulu, meskipun semua gerakan feminisme berangkat dari kesadaran, asumsi terhadap diskriminasi, ketidaksetaraan, ataupun ketidakadilan bagi kaum perempuan, tetapi masing-masing mereka memiliki argument tersendiri dalam melihat akar ketidakadilan dan bagaimana strategi untuk menghentikannya, karena itu, untuk menganalisis akar permasalahan perempuan secara umum di dunia saat ini berkembang beberapa perspektif feminisme, masing-masing perspektif feminisme tersebut mencoba mendeskripsikan akar permasalahan ketidakadilan bagi perempuan.

Hanya saja ketika berbicara tentang feminisme di Dunia ketiga, tidak terkecuali di Indonesia, baik sebagai ide pemikiran ataupun gerakan masih menghadapi sejumlah dinamika, seperti yang dinyatakan oleh Subono (dalam Jurnal perempuan). Dilemma pertama, muncul berbagai pemikiran bahwa ide-ide atau aksi-aksi feminisme tidak relevan atau paralel dengan situasi perempuan. Dunia ketiga. Sebab ide ini dianggap berbau Barat (Amerika Serikat dan Eropa) baik sebagai wacana akademis maupun ideology dari sebuah gerakan perempuan. Kedua, sebaliknya ada pula yang melihat bahwa ide-ide pemikiran feminisme justru relevan bahkan sangat dibutuhkan bagi gerakan perempuan Dunia Ketiga, feminisme malah dipandang sebagai bahan pendorong gerakan perempuan di Dunia Ketiga.

Persoalan kemudian, muncul kecenderungan bahwa kalangan feminisme Barat mendukung perempuan Dunia Ketiga sebagai objek dari berbagai persoalan yang ada. Dua kubu di atas masih merupakan kekuatan yang tarik menarik bagi gerakan feminisme Dunia ketiga. Terlepas dari dilemma pemikiran tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Ollenburger dan Moore meskipun ia melihat bahwa teori-teori feminisme sering mengabarkan posisi dan



kondisi kontemporer perempuan, dengan memusatkan perhatian pada masa-masa lalu yang bersifat historis dan masa depan yang otupis, namun tetap memakai teori-teori feminisme dalam rangka membantu pemahaman tentang kondisi material dan kultural kaum perempuan. Untuk itu perlu diungkap masing-masing perspektif feminisme yang ada.

Secara umum gerakan feminisme dibagi dalam dua aliran besar, yaitu 1), aliran fungsionalisme 2). Aliran konflik. Pemisahan ini tidaklah sepenuhnya bersifat beku. Sebab pada perkembangan berikutnya, muncul kecenderungan terjadinya saling tumpang tindih, modifikasi, dan pengayaan dari masing-masing perspektif feminisme tersebut. Dalam dua aliran besar feminisme di atas, setidaknya ada empat perspektif feminisme yang mengilhami gerakan perempuan dunia (terutama Dunia Ketiga) kini, yaitu.

Pertama, perspektif feminisme liberal. Perspektif ini merupakan bagian dari paradigma fungsionalisme. Fakih menyatakan bahwa munculnya feminisme liberal merupakan reaksi atas teori pembangunan liberal. Kaum liberal melihat bahwa ketertinggalan kaum perempuan dalam proses-proses pembangunan adalah disebabkan oleh ketidaksanggupan mereka sendiri, karena sifat tradisionalnya. Bagi kaum liberal, proses pembangunan, modernisasi, teknologi, maupun sistem ekonomi membuka peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Berbagai pendirian kaum liberal dan modernis tersebut memancing reaksi yang salah satunya berasal dari kaum feminis yang sebenarnya beraliran liberal juga. Ollenburger dan Moore menerangkan bahwa bagi kaum feminisme liberal penindasan terhadap perempuan baik secara individual ataupun kelompok. Asumsinya, jika kaum perempuan diberi akses yang sama untuk bersaing mereka akan berhasil.

Tuntutan yang diajukan oleh gerakan feminisme liberal sebagaimana dijelaskan Hadarpersamaan hak dalam mengecap pendidikan hak sosial politik hak kerja produktif antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dijelaskan Faqih feminisme liberal menawarkan pemecahan proses marginalisasi perempuan dengan jalan melakukan perubahan hukum dan peraturan serta membuka peluang bagi kaum perempuan supaya mempunyai akses dan kontrol yang sama pekerjaan dan imbalanpekerjaan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, Ollenburger dan Moore menyatakan bagi kaum feminisme Marxis muncul keyakinan hanya jika penindasan ekonomi dihapuskan barulah penindasan patriarki dapat dihapuskan. Agar masyarakat berubah dituntut perubahan sosial yang radikal dalam struktur ekonomi, dan penghancuran ketidaksamaan yang berdasarkan kelas itu. Fokusnya adalah faktor-faktor struktural yang menindas. Pendapat tersebut diperkuat oleh faqih bahwa bagi kaum feminisme Marxis, penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari sistem eksploitasi yang bersifat



structural. Karenanya, melainkan system kapitalisme itu sendiri. Oleh karena penyebab penindasan kaum perempuan adalah structural, maka penyelesaiannya adalah revolusi atau putus hubungan dengan system kapitalis internasional.

Ketiga, perspektif feminisme radikal. Bagi feminisme radikal sebagaimana dijelaskan Ollenburger dan Moore penindasan perempuan dilakukan oleh system social yang patriarkis yakni penindasan-penindasan yang paling mendasar. Hidayati menyatakan jika feminisme Marxis menitikberatkan permasalahannya perempuan dikaitkan dengan pekerjaan perempuan, maka feminisme radikal menitikberatkan perhatiannya pada permasalahan perempuan dalam hal reproduksi dan seksualitas mereka. Perspektif ini berangkat dari asumsi ideology patriarki, yaitu system kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan keluarga sebagai dasar keterbelakangan perempuan. Supaya perempuan terbebas dari system penindasan yang ada, maka dilakukan perubahan terhadap system masyarakat yang patriarki tersebut. Gerakan kaum feminis radikal melihat bahwa segala sifat meskipun itu ada sebagai akibat langsung dari dominasi kaum lelaki. Karena itu, dominasi tersebut harus direbut untuk kemudian dihapuskan, demikian menurut Hadar.

E. Gerakan Perempuan di Inggris dan di Amerika Serikat

Tokoh utama yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan adalah Mary Wollstonecraft. Bukunya yang sangat berpengaruh adalah *A Vindication of the Rights of Women* yang terbit tahun 1792. Dalam buku ini ditegaskan pentingnya pendidikan bagi perempuan karena pada waktu itu perempuan tidak mendapatkan pendidikan formal. Dengan pendidikan bagi perempuan maka mereka dapat mengembangkan rasionya. Mereka akan menjadi warga negara yang berguna dan seluruh umat manusia akan maju.

Tokoh lain yang memperjuangkan hak-hak bagi perempuan adalah John Stuart Mill yang dalam bukunya berjudul *The Subjection of Women*, terbit tahun 1869, dianggap Kitab Suci bagi pergerakan perempuan di Eropa. Buku ini sangat berpengaruh, karena Mill menghubungkan gerakan perempuan (yang kemudian disebut dengan gerakan feminisme) dengan pemikiran liberalisme. Liberalisme memandang bahwa dunia terdiri dari sekian banyak atom, individu-individu yang bersama-sama bersaing untuk meraih keuntungan bagi masing-masing. Persaingan yang bebas ini akan bermanfaat pula bagi masyarakat, karena yang paling bijaksana akan mencapai tempat di atas dan yang jahat serta malas akan tinggal di bawah. Pendidikan harus menjunjung tinggi moral maupun akal, pikiran yang rasional harus berdasarkan disiplin diri dan ajaran agama. Mill berpendapat bahwa persamaan dalam



hukum bagi laki-laki dan perempuan adalah syarat utama untuk mencapai masyarakat yang adil, yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua (Evans, 1979). Gerakan perempuan di Inggris pada waktu itu mengutamakan perjuangan memperoleh hak pilih yang mengalami tantangan keras, sehingga menuntut banyak pengorbanan.

Setelah Revolusi Amerika berakhir (1861-1863) kaum perempuan mulai ikut bergerak dalam rangka pembaharuan kehidupan agama. Terbentuknya banyak organisasi sukarela yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan di bidang moral, sosial, pendidikan dan perikemanusiaan pada umumnya. Begitupula kaum perempuan berperan dalam gerakan anti perbudakan yang dimulai tahun 1830. Tetapi disayangkan bahwa mereka akhirnya tidak boleh menjadi peserta dalam Konvensi Anti Perbudakan Sedunia yang diselenggarakan di London tahun 1840. Kejadian yang mengecewakan ini mendorong perempuan mengadakan kegiatan-kegiatan yang langsung mengenai kepentingan perempuan, misalnya di bidang hukum agar istri berhak atas miliknya sendiri setelah menikah. Kegiatannya memuncak tahun 1848 ketika diadakan Konvensi Hak-hak Perempuan di kota Seneca Falls. Banyak tuntutan dikemukakan mengenai persamaan hak di semua bidang kehidupan. Perhatian dipusatkan pada 3 hal, agar memperoleh hak memiliki pendapatan hasil pekerjaan sendiri, hak atas anak-anak setelah perceraian dan hak pilih (hak pilih baru diberikan pada perempuan pada tahun 1920 untuk seluruh Amerika Serikat, yaitu 70 tahun setelah diperjuangkan).

Setelah memiliki hak pilih, maka kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi perempuan terutama dilakukan di bidang kesejahteraan sosial. Sementara itu makin banyak perempuan memasuki lembaga-lembaga pendidikan, juga di perguruan tinggi. Dalam tahun 1950-an lebih dari sepertiga jumlah perempuan bekerja di luar rumah secara penuh, tapi banyak mengalami diskriminasi dalam pekerjaan: pria lebih cepat diberikan kesempatan maju dan menerima upah lebih besar untuk pekerjaan yang sama (Yates, 1977: 3). Kecemasan perempuan makin memuncak dalam tahun 1960-an karena pengalaman pahit yang diderita oleh perempuan muda yang aktif dalam gerakan hak sipil dan dalam New Left yang radikal. Maka timbullah "Women Liberation Movement" yang radikal. Gerakan ini mencakup berbagai kelompok-kelompok yang berbeda-beda, tetapi yang paling radikal adalah yang ingin mengubah masyarakat dimana perempuan memisahkan diri dari laki-laki, yang dianggap penindas perempuan dalam keluarga maupun dalam masyarakat. "Women's Lib" sangat vokal sehingga sering disamakan dengan gerakan perempuan di dunia Barat pada umumnya. Terdapat beberapa gerakan feminisme yang masing-masing mempunyai ciri-



cirinya sendiri, misalnya feminisme radikal, feminisme marxis, feminisme sosialis, feminisme psikoanalitik, feminisme eksistensial, feminisme pasca-modern.

F. Penutup

Mencermati gerakan perempuan hari ini, selain menguatnya hegemoni kultur patriarki, problem pokok kita terus terpapar dengan massifnya kebijakan neoliberalisme dalam berbagai sektor. Perempuan selalu menjadi objek yang rentan terhadap sasaran penindasan.

Di bidang ekonomi, persoalan pokoknya adalah terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat lebar antara yang kaya dan miskin. Selain itu, kenaikan harga kebutuhan pokok juga menjadi problem besar bagi perempuan. Karena selama ini, peran perempuan dalam masyarakat kita masih ditempatkan di ranah domestik. Sehingga perempuan yang paling pusing ketika ada kenaikan harga sembako, listrik, gas, dll.

Sistem neolib ini juga telah merambah ke pedesaan, dimana pembangunan pabrik-pabrik untuk kepentingan industri telah menyebabkan terjadinya sengketa atau konflik agraria. Dalam setiap kasus sengketa lahan ini, kaum perempuan pula yang menjadi korban. Mereka harus tergusur dari tempat tinggal dan penghidupannya, sehingga menambah daftar panjang persoalan-persoalan lainnya seperti pendidikan anak yang mengalami penggusuran, dll.

Berbicara di ranah politik, kaum perempuan masih belum cukup representasinya dalam poros-poros legislatif, baik di tingkat pusat sampai pada tataran kepemimpinan paling bawah. Menyoal politik perempuan, kita perlu terlibat aktif dalam wadah perjuangan yang benar-benar mengakomodir kepentingan perempuan untuk maju, termasuk organisasi sebagai wadah/alat perjuangan dalam bingkai gerakan sosial.

Perempuan perlu membangun konsep kesetaraan dalam politik, sedini mungkin meskipun masih di level sebagai siswa. Misalnya menyangkut pemilihan Ketua Osis di SMA, atau Ketua BEM atau Senat Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Secara sederhana, dalam proses pemilihan Osis, BEM maupun Senat, kita sudah menggunakan praktek-praktek politik, walaupun masih dalam konsep politik yang sederhana.

Arus globalisasi menyebabkan kita tak bisa mengelak dari gencarnya kebijakan-kebijakan neoliberal yang begitu massif. Sehingga, untuk membentenginya kita perlu membangun konsep gerakan anti neoliberalisme. Pancasila sebagai ideologi negara



seharusnya mampu dimanifestasikan dalam membangun gerakan sosial yang berbasis keadilan gender, dengan memadukan perspektif gerakan menuju kesejahteraan sosial.

Menangkan Pancasila, Wujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Sosial !

End Note

¹Miriam Budiardjo,.. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)

² T.O, Ihromi,.. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 76.

³ Hendra Gunawan, “*Karakteristik Hukum Islam*” pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019, hlm. 105-125.

⁴ Murniati, A. Nunuk Prasetyo,.. *Getar Gender (Buku Pertama) Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*. (Yogyakarta: Indonesiatara, 2004), hlm. 43.

⁵ Sukanti Suryochondro,.. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia* (Jakarta: C.V. Rajawali, 1984), hlm. 21.

⁶ Totok Sapto Gondo,.. *Laskar Wanita Indonesia*(Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1981), hlm. 5.

⁷ Hendra Gunawan, “*Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional*” Pada Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Jurnal Hukum Ekonomi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 108-131.

⁸ Hendra Gunawan, “*Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia*” pada Jurnal Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 43-60.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

T.O, Ihromi,.. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Murniati, A. Nunuk Prasetyo,.. *Getar Gender (Buku Pertama) Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Indonesiatara, 2004.

Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1984.
Gondo, Totok Sapto,.. *Laskar Wanita Indonesia*, Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1981.

Gunawan, Hendra, “*Karakteristik Hukum Islam*” pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019.

-----, “*Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional*” Pada Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Jurnal Hukum Ekonomi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.

-----, “*Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia*” pada Jurnal Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.